



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN GUMELAR**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik.

Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas selama tahun 2022.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,** berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan GUMELAR tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan GUMELAR Kabupaten Banyumas selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Kecamatan Gumelar tahun 2020 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2020 sebesar Rp 2.265.919.414,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp 1.424.390.414,00. dan belanja langsung Rp. 791.859.000,00 Dalam pelaksanaannya terjadi refocusing anggaran dampak pandemi covid 19 menjadi Rp. 2.231.534.709,00 dengan belanja tidak langsung Rp. 1.390.005.709,00 dan belanja langsung Rp 895.784.600,00. Penyerapan anggaran belanja langsung Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 879.441.295,00 (98,17%) dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 895.784.600,00. Program Peningkatan Kecamatan dan Kelurahan merupakan program dengan serapan anggaran terbesar (98,00%), sedangkan Program Pelayanan Perkantoran menunjukkan serapan terkecil yaitu 80,00%.

Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2020 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari tiga program dan 16 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan GUMELAR Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Gumelar Tahun 2022
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2022

Unker : KECAMATAN GUMELAR

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	2022		Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					Target	Rp.		
					Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima			
	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	72,000,517,000	PAD	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				36,380,000	PAD	
			Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	36,380,000	PAD	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		
			Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keg	1000	0		

		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				36,380,000	PAD	
			Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	10	36,380,000	PAD	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				36,380,000	PAD	
			Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Desa	10	36,380,000	PAD	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				64,329,000	PAD	
			Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	64,329,000	PAD	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				64,329,000	PAD	
			Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	10	64,329,000	PAD	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3,010,000	PAD	

			jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	10	3,010,000	PAD	
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				61,319,000	PAD	
			Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Kali	36	61,319,000	PAD	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				15,052,000	PAD	
			Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	15,052,000	PAD	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5,017,000	PAD	
			Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	10	5,017,000	PAD	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3,010,000	PAD	
			Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	unsur	5	3,010,000	PAD	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2,007,000	PAD	

			Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Kali	3	2,007,000	PAD	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10,035,000	PAD	
			Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keg	5	10,035,000	PAD	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				10,035,000	PAD	
			Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	Keg	12	10,035,000	PAD	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				5,015,000	PAD	
			Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	5,015,000	PAD	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				5,015,000	PAD	
			Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	10	5,015,000	PAD	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5,015,000	PAD	
			Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kali	4	5,015,000	PAD	

		Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0	PAD	
			Frekwensi Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kali		0	PAD	
		Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0		
		Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				0		
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,556,183,000	PAD	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	2,883,000	PAD	
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,883,000	PAD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	5	2,883,000	PAD	
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,017,000	PAD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	6	1,017,000	PAD	
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,866,000	PAD	
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	1,866,000	PAD	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1,807,929,000	PAD	
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,807,929,000	PAD	
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	12	1,807,929,000	PAD	

		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1,774,811,000	PAD	
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	11	1,774,811,000	DAU	
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				33,118,000	PAD	
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	12	33,118,000	PAD	
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	219,044,000	PAD	
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				57,783,000	PAD	
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	4	57,783,000	PAD	
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57,783,000	PAD	
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	4	57,783,000	PAD	
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	PAD	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	0	0	PAD	
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				161,261,000	PAD	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	161,261,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50,179,000	PAD	

			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	9	50,179,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11,561,000	PAD	
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	11,561,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35,574,000	PAD	
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2	35,574,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				63,947,000	PAD	
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	4	63,947,000	PAD	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Bulan	2	0		
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	526,327,000	PAD	

		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				312,117,000	PAD	
			Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	12	312,117,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				66,482,000	PAD	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	66,482,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20,104,000	PAD	
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	6	20,104,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				110,420,000	PAD	
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	15	110,420,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14,937,000	PAD	
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	2	14,937,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100,174,000	PAD	
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12	100,174,000	PAD	
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				214,210,000	PAD	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	12	214,210,000	PAD	
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35,032,000	PAD	
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	3	35,032,000	PAD	

		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28,100,000	PAD	
			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	5	28,100,000	PAD	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				151,078,000	PAD	
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	6	151,078,000	PAD	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kecamatan Gumelar

1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			9	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					6	7	8=(7/6)		10=5+7+9	11=10/4
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
	Mewujudkan kinerja pelayanan						0		0	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	83	84	84	101,2		84	97
	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat						103		84	84
		Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100	100		100	100
		Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	100	90	90	90		90	90

	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan							100		80	0
		Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	90	100	100	100		100	100
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100	100	100		100	100

1	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
		Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	90	100	100	100		100	100
		Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	100	85	85	95	95		95	101
		Persentase kelompok swadaya masyarakat di	%	90	85	85	85	100		85	94
		Persentase Linmas terbina	%	90	85	85	85	100		85	94
	Fasilitasi penyelenggaraan							100		85	0
		pemohon PATEN yang terlayani	%	100	100	100	100	100		100	100
		penyelenggaraan pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100		100	100
	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan							100		100	0
		Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan	%	100	100	100	100	100		100	100

		Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan	Kali	20	4	4	4	100		8	40
		kegiatan perencanaan dan pembangunan desa / kelurahan yang terfasilitasi	Kali	5	1	1	1	100		2	40

1	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+	11=10/4
		kegiatan pembinaan serta pengawasan pengelolaan Dana Desa /	Kali	5	5	5	5	100		5	100
	Fasilitasi Intensifikasi PBB							100		100	100
		Persentase PBB yang dapat terbayar	%	10	100	100	100	100		100	100
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Pengangguhan Kemiskinan Kecamatan							99		91.72	90
		Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Kali	90	90	90	90	100		90	90

	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan							100		32	100
	penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100		100	100
	pelaksanaan rakor Linmas	Kali	10	10	10	10	100			10	100
	pembinaan kepada linmas	Kali	10	10	10	10	100			10	100
	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan yang tertangani	%	100	100	100	100	100			100	100
	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan GUMELAR							100		100	100

1	2	3		4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			9	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						6	7	8=(7/6)		10=5+7+9	11=10/4
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Frekuensi Monitoring dan evaluasi Pengelolaan APBDes	Kali	10	2	2	2	100		4	40
		Frekuensi pembinaan dan pengawasan APBDes	Kali	10	2	2	2	100		4	40
		Prosentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan APBDes dan monitoring evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	%	100	100	100	100	100		100	100
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah							100		100	0

		Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100		100	100
		Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100	100	100		100	100
	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							100		100	0
		Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	25	5	5	5	100		10	40

1	2	3		4	5	6			9	10=5+7+9	
						7	8=(7/6)	11=10/4			
		Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Kali	20	4	4	4	100		8	40
	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran							100		8	0
		Persentase realisasi fisik program	%	100	90	100	95.78	95		95.78	95
		Persentase realisasi keuangan program	%	100	90	100	86.39	86		86.39	86

	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah							86		86.39	0
		Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan	60	12	12	12	100		12	20
		Jasa transaksi keuangan yang dibayar	Lump	5	1	1	1	100		1	20
	Penyediaan bahan logistik kantor							100		1	0
		bahan perlengkapan kerja tersedia	Bulan	60	1	12	12	100		12	20
		alat listrik dan elektronik yang tersedia	Jenis	2	2	2	2	100		4	200
		perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Buah	185	150	165	165	100		315	170

1	2	3		4	5	6			9	10=5+7+9			
						7	8=(7/6)	11=10/4					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan	12	1	12	12	100			12	100	
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan	12	12	12	12	100			12	100	
		cetak dan penggandaan yang tersedia	lbr	3677	40000	45000	30421	67			70421	2630	
	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan							67			70421	0	
		Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan	60	12	12	12	100			12	20	
	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah							100			12	0	

		Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Bulan	60	12	12	12	100		12	20
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah							100		12	0
		peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Jenis	10	10	10	10	100		20	200

1	2	3		4	5	6			9	10=5+7+9	
						7	8=(7/6)	11=10/			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah							100		20	0
		peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Bulan	60	12	12	12	100		12	20
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah							100		12	0
		gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100		100	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah							100		100	0
		kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Bulan	60	12	12	12	100		12	20

		kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Bulan	60	12	12	12	100		12	20
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah							100		12	0
		Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan	60	12	12	12	100		12	20

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok
membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan Gumelar mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
 - g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;

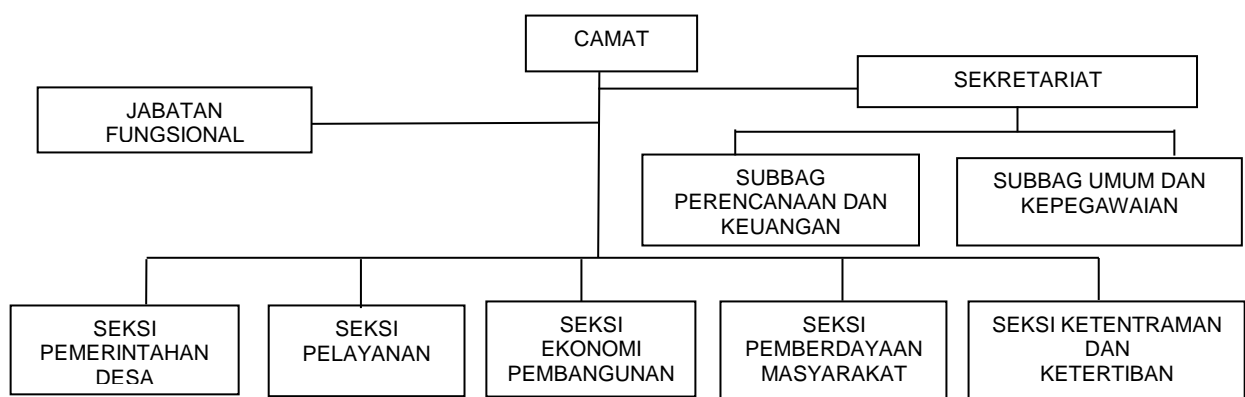
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Gambar 1. Struktur organisasi Kecamatan GUMELAR adalah sebagai berikut:



Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp 2.239.579.229,00 terurai dalam 5 program dan 11 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Tingkat Capaian RKPD 2020	Kenaikan/Penurunan
A	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan						
1	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100	100	0
2	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	85	80	100	5
3	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100	100	0
4	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	100	100	100	100	0
5	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	100	100	100	100	0
6	Persentase Linmas terbina	%	100	85	85	100	0
B	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						
1	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100	100	0
2	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100	100	0
C	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						
1	Persentase realisasi fisik program	%	100	96	90	96	6
2	Persentase realisasi keuangan program	%	100	95	90	95	5

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gumelar sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan di tingkat kecamatan.
2. Kurang pemahamannya masyarakat mengenai syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan.
3. Belum optimalnya jumlah petugas pelayanan dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Gumelar
4. Masih seringnya terjadi kendala pada sistem milik Dindukcapil yang berada di Kecamatan dan belum sinkronnya aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan catatan sipil.
5. Belum optimalnya kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan GUMELAR Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gumelar Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strenght (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta

penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. SDM Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 10 orang yang didominasi oleh pendidikan S1 dan SLTA. Dilihat dari pendidikan reguler, pegawai Kecamatan Gumelar Kab. Banyumas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan

3. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.

4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan antara lain:

- Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan teknis operasional belum optimal dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.

- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan, sehingga perencanaan yang disusun belum bisa simultan dan komprehensif.
- Masih adanya usulan-usulan kegiatan yang diajukan pada saat dokumen RKPD telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak tercover dalam dokumen RKPD.
- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrenbang.

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program;
3. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
4. Komitmen perangkat daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain;
5. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
6. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Banyaknya Lembaga-Lembaga Litbang yang bisa menjadi mitra kerja;
8. Telah disusunnya produk-produk hukum yang memberikan kewenangan dan petunjuk dalam penyusunan proses perencanaan pembangunan.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan

mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif;
4. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah;
5. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;
6. Perubahan peraturan perundangan;
7. Kejadian luar biasa pandemi Covid-19.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup;
2. Adanya mekanisme teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya keterlibatan stakeholders pada proses penyusunan perencanaan pembangunan dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan yang terkait dengan dokumen perencanaan
- Pelaksanaan perencanaan tidak tepat waktu karena mekanisme tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dengan peraturan perundangan yang dinamis
- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum terwujud secara maksimal karena belum sinergisnya kepentingan yang diakomodir

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Gumelar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan umum pembangunan daerah
2. Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD
3. Meningkatkan realisasi pelaksanaan kajian strategi daerah
4. Meningkatkan fasilitasi penerapan inovasi daerah
5. Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi perencanaan
6. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah
7. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan pembangunan ekonomi
8. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia
9. Meningkatkan pelayanan perkantoran
10. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel C-T.31. Rancangan awal RKPD tahun 2022 menunjukkan Kecamatan Gumelar memiliki 5 program dan 11 kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Gumelar Tahun 2022
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2022

Unker : KECAMATAN GUMELAR

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	2022		Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					Target	Rp.		
					Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima			
	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	72,000,517,000	PAD	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				36,380,000	PAD	
			Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	36,380,000	PAD	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		

			Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keg	1000	0		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				36,380,000	PAD	
			Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	10	36,380,000	PAD	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				36,380,000	PAD	
			Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Desa	10	36,380,000	PAD	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				64,329,000	PAD	
			Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	64,329,000	PAD	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				64,329,000	PAD	

			Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	10	64,329,000	PAD	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3,010,000	PAD	
			jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	10	3,010,000	PAD	
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				61,319,000	PAD	
			Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Kali	36	61,319,000	PAD	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				15,052,000	PAD	
			Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	15,052,000	PAD	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5,017,000	PAD	
			Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	10	5,017,000	PAD	

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3,010,000	PAD	
			Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	unsur	5	3,010,000	PAD	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2,007,000	PAD	
			Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Kali	3	2,007,000	PAD	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10,035,000	PAD	
			Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keg	5	10,035,000	PAD	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				10,035,000	PAD	
			Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	Keg	12	10,035,000	PAD	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				5,015,000	PAD	

			Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	5,015,000	PAD	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				5,015,000	PAD	
			Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	10	5,015,000	PAD	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5,015,000	PAD	
			Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kali	4	5,015,000	PAD	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0	PAD	
			Frekwensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kali		0	PAD	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0		
		Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				0		
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,556,183,000	PAD	

			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	2,883,000	PAD	
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,883,000	PAD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	5	2,883,000	PAD	
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,017,000	PAD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	6	1,017,000	PAD	
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,866,000	PAD	
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	1,866,000	PAD	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1,807,929,000	PAD	
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,807,929,000	PAD	
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	12	1,807,929,000	PAD	
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1,774,811,000	PAD	
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	11	1,774,811,000	DAU	
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				33,118,000	PAD	
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	12	33,118,000	PAD	

			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	219,044,000	PAD	
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				57,783,000	PAD	
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	4	57,783,000	PAD	
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57,783,000	PAD	
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	4	57,783,000	PAD	
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	PAD	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	0	0	PAD	
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				161,261,000	PAD	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	161,261,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50,179,000	PAD	
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	9	50,179,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11,561,000	PAD	

			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	11,561,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35,574,000	PAD	
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2	35,574,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				63,947,000	PAD	
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	4	63,947,000	PAD	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Bulan	2	0		
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		

			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	526,327,000	PAD	
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				312,117,000	PAD	
			Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	12	312,117,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				66,482,000	PAD	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	66,482,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20,104,000	PAD	
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	6	20,104,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				110,420,000	PAD	
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	110,420,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14,937,000	PAD	
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah		14,937,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100,174,000	PAD	
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12	100,174,000	PAD	
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				214,210,000	PAD	

			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	12	214,210,000	PAD	
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35,032,000	PAD	
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	3	35,032,000	PAD	
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28,100,000	PAD	
			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	5	28,100,000	PAD	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				151,078,000	PAD	
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	6	151,078,000	PAD	

Tabel T-C.31

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023 KECAMATAN GUMELAR
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN			3,652,546,000	0	0	3,652,546,000		3,683,071,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3,542,509,000	0	0	3,542,509,000	100 %	3,572,144,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 dokumen	3,712,000	0	0	3,712,000	5 dokumen	3,744,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	1,856,000	0	0	1,856,000	1 dokumen	1,872,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 kegiatan	1,856,000	0	0	1,856,000	4 kegiatan	1,872,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjingannya	21 orang	3,012,930,000	0	0	3,012,930,000	21 orang	3,038,110,000

Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	21 orang	2,980,715,000	0	0	2,980,715,000	21 orang	3,005,626,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	9 orang	32,215,000	0	0	32,215,000	9 orang	32,484,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	12 bulan	192,537,000	0	0	192,537,000	12 bulan	194,147,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik / penerangan bangunan yang tersedia	12 jenis	14,187,000	0	0	14,187,000	12 jenis	14,306,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20 jenis	16,266,000	0	0	16,266,000	20 jenis	16,402,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 jenis	5,017,000	0	0	5,017,000	20 jenis	5,059,000

Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022				Hasil Analisa Kebutuhan		
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber						
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	12 jenis	47,671,000	0	0	47,671,000	12 jenis	48,069,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia	25 buah 15.000 lem	11,039,000	0	0	11,039,000	25 buah 15.000 lem	11,132,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi / konsultasi dan pertemuan tingkat provinsi / pusat yang dilaksanakan	70 kali	98,357,000	0	0	98,357,000	70 kali	99,179,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	4 unit	77,346,000	0	0	77,346,000	4 unit	77,991,000
Pengadaan meubeler kantor	Jumlah meubeler kantor yang tersedia	4 unit	16,057,000			16,057,000	4 unit	16,191,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	4 jenis	47,239,000	0	0	47,239,000	4 jenis	47,633,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	4 unit	14,050,000	0	0	14,050,000	3 unit	14,167,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022				Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023		
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN			Total
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12 bulan	201,792,000	0	0	201,792,000	12 bulan	203,477,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	12 bulan	47,212,000	0	0	47,212,000	12 bulan	47,606,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	5 jenis	9,283,000	0	0	9,283,000	5 jenis	9,360,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	6 orang	145,297,000	0	0	145,297,000	6 orang	146,511,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	8 unit	54,192,000	0	0	54,192,000	8 unit	54,645,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	8 unit	34,122,000	0	0	34,122,000	8 unit	34,407,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022				Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	10,035,000	0	0	10,035,000	25 unit 10,119,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	1 unit	10,035,000	0	0	10,035,000	3 unit 10,119,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	12,770,000	0	0	12,770,000	100 % 12,876,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani	100 %	12,770,000	0	0	12,770,000	100 % 12,876,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pemohon PATEN yang terlayani	100 %	6,749,000	0	0	6,749,000	100 % 6,805,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022				Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	15 desa	6,021,000	0	0	6,021,000	15 desa 6,071,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	33,041,000	0	0	33,041,000	100 % 33,318,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 orang	12,770,000	0	0	12,770,000	100 orang 12,877,000
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	45 kali	5,218,000	0	0	5,218,000	45 kali 5,262,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	12 kali	15,053,000	0	0	15,053,000	12 kali	15,179,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	25,087,000	0	0	25,087,000	100 %	25,297,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	15,052,000	0	0	15,052,000	100 %	15,178,000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	6 unsur	10,035,000	0	0	10,035,000	6 unsur	10,119,000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	15 kali	5,017,000	0	0	5,017,000	15 kali	5,059,000

Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terrlaksananya pembinaan linmas	15 kegiatan	10,035,000	0	0	10,035,000	15 kegiatan	10,119,000
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	15 keg	10,035,000	0	0	10,035,000	15 keg	10,119,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %	39,139,000	0	0	39,139,000	100 %	39,466,000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah perdes dan perkades yang terfasilitasi	1 dok	29,104,000	0	0	29,104,000	1dok	29,347,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	12 kali	10,035,000	0	0	10,035,000	12 kali	10,119,000
			3,652,5460,	0	0	3,652,5460,000		3,683,071,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2022 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2022 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 ditujukan pada **“Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai RPJMD tahun 2018-2023 mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk **Peningkatan ekonomi dengan penguatan daya saing ekonomi dan SDM** dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
- 2 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- 3 Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah
- 4 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
- 5 Pengembangan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Gumelar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kabupaten Banyumas, membantu Bupati

Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2018-2023. **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Kecamatan GUMELAR Kabupaten Banyumas Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Gumelar Kab. Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Gumelar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kabupaten Banyumas. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Kecamatan Gumelar dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Kecamatan Gumelar mempunyai 5 program dan 11 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima seksi dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2022 yaitu Rp 2,973,483,000,00 dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten sebesar Rp 2,973,483,000,00 Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 pada table T-C.33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			201,792,800	0	0	201,792,800		203,477,800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	12 bulan	47,212,200	0	0	47,212,200	12 bulan	47,606,200
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	5 jenis	9,283,000	0	0	9,283,000	5 jenis	9,360,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai Non ASN	6 orang	145,297,600	0	0	145,297,600	6 orang	146,511,600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54,192,000	0	0	54,192,000		54,645,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	8 unit	34,122,00	0	0	34,122,00	8 unit	34,407,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	25 unit	10,035,000	0	0	10,035,000	25 unit	10,119,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	1 unit	10,035,000	0	0	10,035,000	3 unit	10,119,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12,770,000	0	0	12,770,000		12,876,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			12,770,000	0	0	12,770,000		12,876,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	20400 orang	6,749,000	0	0	6,749,000	20400 orang	6,805,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber					Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	15 desa	6,021,000	0	0	6,021,000	15 desa	6,071,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			33,041,000	0	0	33,041,000		33,318,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	15 Desa	33,041,000	0	0	33,041,000	15 Desa	33,318,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 orang	12,770,000	0	0	12,770,000	100 orang	12,877,000
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	45 kali	5,218,000	0	0	5,218,000	45 kali	5,262,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	12 kali	15,053,000	0	0	15,053,000	12 kali	15,179,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			25,087,000	0	0	25,087,000		25,297,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			15,052,000	0	0	15,052,000		15,178,000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	6 unsur	10,035,000	0	0	10,035,000	6 unsur	10,119,000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	15 kali	5,017,000	0	0	5,017,000	15 kali	5,059,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			10,035,000	0	0	10,035,000		10,119,000
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	15 keg	10,035,000	0	0	10,035,000	15 keg	10,119,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %	39,139,000	0	0	39,139,000	100 %	39,466,000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	20 Desa	39,139,000	0	0	39,139,000	20 Desa	39,466,000
	Jumlah Perdes dan Perkades yang terfasilitasi	1 dokumen	29,104,000			29,104,000		29,347,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	12 kali	10,035,000	0	0	10,035,000	12 kali	11,612,000
			3,652,546,000	0	0	3,652,546,000		3,683,071,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2019-2023

Unker : KECAMATAN GUMELAR

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
TOTAL						2324437879		2673253000		2710269000		7707959879	PAD	
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		84	2324437879	85	2673253000	86	2710269000	90	7707959879	PAD	
	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	6248343073 3	100	7188005100 0	100	7283757100 0	100	20720105273 3	PAD	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				36250000		35280000		36684000		108214000	PAD	
			Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	36250000	100	35280000	100	36684000	100	108214000	PAD	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
			Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keg	1000		1000		1000		3000			

		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				36250000		35280000		36684000		108214000	PAD	
		Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	2	36250000	2	35280000	2	36684000	2	108214000	PAD		

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan												
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				36250000		35280000		36684000		108214000	PAD	
			Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Desa	10	36250000	10	35280000	10	36684000	10	108214000	PAD	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				64100000		74445000		64866000		203411000	PAD	

			Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	64100000	100	74445000	100	64866000	100	203411000	PAD	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				64100000		74445000		64866000		203411000	PAD	
			Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	10	64100000	10	74445000	10	64866000	10	203411000	PAD	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3000000		10195000		3035000		16230000	PAD	

			jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	50	3000000	200	10195000	200	3035000	450	16230000	PAD	
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			61100000		64250000		61831000		187181000	PAD	
			Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Kali	36	61100000	36	64250000	36	61831000	108	187181000	PAD	

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				15000000		11958200		15177000		42135200	PAD	
		Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	15000000	100	11958200	100	15177000	100	42135200	PAD		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5000000		0		5058000		10058000	PAD	

			Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	10	5000000	10	0	10	5058000	30	10058000	PAD	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			3000000		0		3035000		6035000	PAD	
			Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	unsur	5	3000000	0	0	5	3035000	15	6035000	PAD	

		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2000000	0			2023000		4023000	PAD	
			Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Kali	3	2000000	0	0	3	2023000	9	4023000	PAD	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10000000		11958200		10119000		32077200	PAD	
			Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keg	2	10000000	2	11958200	2	10119000	6	32077200	PAD	

		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				10000000		11958200		10119000		32077200	PAD	
			Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	Keg	12	10000000	12	11958200	12	10119000	36	32077200	PAD	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				4998000		0		20057000		25055000	PAD	

			Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	4998000	100	0	100	20057000	100	25055000	PAD	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				4998000		0		20057000		25055000	PAD	
			Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	10	4998000	10	0	10	20057000	10	25055000	PAD	

		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa											
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4998000	0		5057000		10055000	PAD	
		Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kali	4	4998000	0	0	4	5057000	12	10055000	PAD	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0	0		15000000		15000000	PAD	

			Frekwensi Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kali		0		0	1	15000000	1	15000000	PAD	
			Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
			Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan											
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2204089879		2551569800		2573485000		7329144679	PAD	

			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	2873900	100	5575000	100	2908000	100	11356900	PAD	
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2873900		5575000		2908000		11356900	PAD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	2873900	3	5575000	3	2908000	10	11356900	PAD	
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1013900		1975000		1026000		4014900	PAD	

			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	4	1013900	3	1975000	3	1026000	10	4014900	PAD	
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1860000		3600000		1882000		7342000	PAD	
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	1860000	3	3600000	3	1882000	10	7342000	PAD	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1557569155	100	1807799500	100	1823039000	100	5188407655	PAD	
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1557569155		1807799500		1823039000		5188407655	PAD	

			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	1557569155	3	1807799500	3	1823039000	3	5188407655	PAD	
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1529019155		1774799500		1789644000		5093462655	PAD	
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	11	1529019155	11	1774799500	11	1789644000	11	5093462655	PAD	
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			28550000		33000000		33395000		94945000	PAD	
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	4	28550000	4	33000000	4	33395000	4	94945000	PAD	
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	198529950	100	221435000	100	220875000	100	640839950	PAD	

		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				107555250		60000000		58266000		225821250	PAD	
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	1	107555250	1	60000000	2	58266000	4	225821250	PAD	
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57576750		60000000		58266000		175842750	PAD	
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	4	57576750	4	60000000	4	58266000	12	175842750	PAD	
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				49978500		0		0		49978500	PAD	

			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	1	49978500	0	0	0	0	1	49978500	PAD	
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90974700		161435000		162609000		415018700	PAD	
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	90974700	4	161435000	4	162609000	4	415018700	PAD	

			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	2		2		2		2		
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35700000		50400000		50598000		136698000	PAD
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	9	35700000	9	50400000	9	50598000	9	136698000	PAD
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11520000		11860000		11657000		35037000	PAD

			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	11520000	20	11860000	20	11657000	20	35037000	PAD
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30013500		35750000		35872000		101635500	PAD
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2	30013500	2	35750000	2	35872000	2	101635500	PAD
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13741200		63425000		64482000		141648200	PAD

			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	4	13741200	4	63425000	4	64482000	4	141648200	PAD	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Bulan	2		2		2		2			
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	445116874	100	516760300	100	526663000	100	1488540174	PAD	
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				239671850		308806700		310663000		859141550	PAD	
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	239671850	6	308806700	6	310663000	6	859141550	PAD	

		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50199150		65638000		67038000		182875150	PAD	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	50199150	4	65638000	4	67038000	16	182875150	PAD	
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14982000		20157000		20272000		55411000	PAD	
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	6	14982000	6	20157000	6	20272000	6	55411000	PAD	
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				84920800		111335700		111342000		307598500	PAD	
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	15	84920800	15	111335700	15	111342000	15	307598500	PAD	

		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10888000		11000000		11000000		32888000	PAD	
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	750	3000000	750	3000000	750	3000000	2350	9000000	PAD	
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	25000	7888000	25000	8000000	25000	8000000	75000	23888000	PAD	
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78681900		100676000		101011000		280368900	PAD	
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12	78681900	12	100676000	12	101011000	36	280368900	PAD	

		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				205445024		207953600		216000000		629398624	PAD	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	205445024	3	207953600	3	216000000	3	629398624	PAD	
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34907424		35916000		35325000		106148424	PAD	
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	3	34907424	3	35916000	3	35325000	3	106148424	PAD	
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20000000		21500000		28335000		69835000	PAD	

			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	5	20000000	5	21500000	5	28335000	15	69835000	PAD	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150537600		150537600		152340000		453415200	PAD	
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	6	150537600	6	150537600	6	152340000	6	453415200	PAD	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan GUMELAR tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Gumelar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2022 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Kecamatan Gumelar dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Kecamatan Gumelar menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.



